

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020



KABUPATEN PASAMAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGARI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

JL. SOEKARNO HATTA-KOMP. PERTANIAN PADANG TUJUH
KAB. PASAMAN BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
Jln.Ssekarno - Hatta Komplek Pertanian Sukomenati
Simpang Empat - Pasaman Barat

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari: (1). Laporan Realisasi Anggaran, (2). Laporan Operasional, (3). Laporan Perubahan Ekuitas, (4). Neraca, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah diusahakan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Simpang Empat, Januari 2021

Kepala,



ETRIS DSEM, S.STP. M.Si
NIP. 197812181999121001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Di akhir Tahun Anggaran 2020 ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019. Laporan Keuangan dimaksud mencakup: (1). Laporan Realisasi Anggaran, (2). Laporan Operasional, (3). Laporan Perubahan Ekuitas, (4). Neraca, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan ini tersedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019.

Penyampaian Laporan Keuangan ini merupakan salah satu upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada *stakeholders* didasarkan pada pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

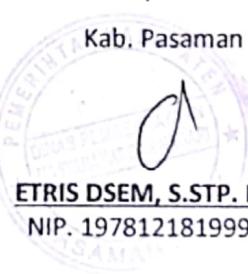
peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kami akan tetap terus berupaya untuk melakukan penyempurnaan dalam menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sebagai salah satu upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Simpang Empat, Januari 2021

Kepala DPMN

Kab. Pasaman Barat



DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Lampiran	
LRA	
Neraca	
LO	
LPE	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD/SKPKD.....	1
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD/SKPKD.....	3
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD/SKPKD.....	4
1.4 Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.....	5
Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD/SKPKD.....	7
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD/SKPKD.....	7
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah Ditetapkan.....	7

Bab III Kebijakan Akuntansi.....	11
Bab IV Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD/SKPKD.....	23
4.1 Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan LRA.....	23
4.1.1 Pendapatan.....	23
4.1.2 Belanja.....	24
4.2 Penjelasan atas pos-pos laporan Operasional	31
4.3 Penjelasan atas pos-pos laporan LPE.....	43
Bab V Penjelasan Penting Lainnya	
5.1 APBD.....	60
5.2 Belanja Tidak Terduga (BTT).....	61
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	62
6.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi.....	62
6.2 Sasaran Pembangunan Visi dan Misi Organisasi.....	81
Bab VI Penutup.....	82

Lampiran-lampiran

BAB VII PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

Kinerja pendapatan tidak ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Pasaman Barat, di sisi belanja, diharapkan dapat terlaksana dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan.

Laporan Keuangan Tahun 2020 yang mengacu pada Undang-Undang yang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi. Penggunaan sistem ini telah menggunakan double entry, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntasi maupun teknologi informasi.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

